

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



WORLD TEXTILES JOURNAL

DAIKIN CHEMICAL SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
No. 6302, Binang Estate at Block 207 Fajar Road 3691, 1411, (Subang) (Jaya)
Bangkok 10110, Thailand
Tel: +66-2-209-2022

Search here for more information

UNIDYNE



Biaya Logistik Perlu Perhatian Pemerintah

Di tengah kondisi pasar yang belum pulih baik domestik maupun ekspor, kinerja industri TPT nasional kali ini terhambat oleh mahalnya biaya angkut yang meningkat hampir 4 kali lipat ditambah sulitnya mendapatkan peti kemas terutama untuk pasar tradisional yang berada di wilayah tersebut. negara tujuan ekspor utama.

Di sini sekali lagi diperlukan intervensi pemerintah agar kinerja ekspor TPT tetap terjaga diiringi penguasaan pasar dalam negeri. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pemulihan industri TPT nasional.

Bulan ini kami meluncurkan INDOTEXTILES TV yang dapat diakses melalui Channel kami di Youtube, Instagram dan Tiktok. Semoga dapat memudahkan pembaca dalam mengakses informasi yang kami sajikan dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih atas dukungan Anda sejauh ini.

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-70

Berita Utama

- Bea Cukai Nunukan Musnahkan Ribuan Barang Ilegal Senilai Lebih dari Rp 1,8 Miliar

Berita Terbaru

- Gelombang PHK Pabrik Tekstil Terus Berlanjut, 6.500 Orang Kini Terdampak
- CiFFest 2023: Komitmen IKJ Dorong Fesyen Berkelanjutan
- Tantangan Berat Menanti Industri Tekstil Indonesia di Tahun 2024
- Dampak Thrifting Terhadap Industri Tekstil di Indonesia: Ancaman dan Tantangan
- Bahan Baku Tekstil Impor dan Tantangan Industri TPT Indonesia
- Gelombang PHK di Industri Tekstil: Tantangan dan Tuntutan untuk Masa Depan
- Terpuruknya Industri Tekstil DIY: Tantangan dan Saran Ekonom
- Pasar Tekstil di Jakarta yang Kian Meredup
- Pengusaha Tekstil Menghadapi Tantangan UMP 2024: Pasrah atau Terus Berjuang?
- Kembalinya Toko TikTok dan Kemunduran Industri Tekstil: Dampaknya terhadap Barang Lokal dan Ketegangan Ekonomi
- Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT): Menyongsong Masa Depan dengan Tenaga Kerja Kompeten
- Dampak Libur Panjang Terhadap Industri: Tantangan dan Peluang
- Kemenperin Melalui Politeknik STTT Bandung: Membentuk Kekuatan Tenaga Kerja di Industri Tekstil
- Indonesia Siap Terapkan Aturan Harga Pokok Produksi (HPP) di E-commerce: Langkah Menuju Keseimbangan Pasar Digital

BERITA UTAMA

Bea Cukai Nunukan Musnahkan Ribuan Barang Ilegal Senilai Lebih dari Rp 1,8 Miliar



Nunukan, 7 November 2023 – Hari Selasa yang lalu menjadi saksi pemusnahan ribuan barang ilegal senilai lebih dari Rp 1,8 miliar yang berhasil disita oleh petugas gabungan di wilayah perbatasan Indonesia, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur, dalam upaya melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal yang dapat membahayakan stabilitas keamanan, perekonomian negara, kesehatan, dan industri dalam negeri.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kusuma Santi Wahyuningsih, menjelaskan bahwa barang-barang ilegal ini merupakan hasil tangkapan petugas TNI-Polri bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Nunukan. Barang-barang tersebut telah dinyatakan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan tidak memiliki pemilik yang sah, sehingga tidak ada yang akan diproses ke persidangan.

Tindakan penindakan barang ilegal ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi

sebagai Community Protector yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman barang-barang ilegal. Bea Cukai Nunukan bekerja sama dengan berbagai instansi dan aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mencegah peredaran barang ilegal.

Barang-barang ilegal yang dimusnahkan termasuk 840 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merek, 108.916 batang rokok, 15.921 pieces kosmetik, dan obat-obatan tanpa izin kesehatan. Selain itu, juga terdapat produk tekstil berupa 117 karung ballpress yang berisi pakaian bekas dan sepatu bekas, serta 9 bungkus barang lain tanpa izin instansi terkait yang hasil penindakan selama periode November 2022 hingga Oktober 2023.

Kusuma Santi Wahyuningsih menjelaskan, "Perkiraan nilai barang ilegal mencapai Rp 1.814.175.000 dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan ini sekitar Rp 686.028.000." Oleh karena itu, pemusnahan barang-barang ilegal ini adalah langkah yang sangat penting dalam mencegah kerugian yang dapat timbul dari peredaran barang-barang ilegal.

Selain pemusnahan, KPPBC Nunukan juga melakukan hibah barang yang menjadi milik negara kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan. Hibah tersebut berupa 352 lembar karpet asal Malaysia yang masuk secara ilegal. Penindakan terhadap karpet ini telah berlangsung selama periode Juni 2022 hingga Agustus 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 23 perkara. Perkiraan nilai barang karpet ilegal mencapai Rp 165.500.000 dengan potensi kerugian negara dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor senilai Rp 118.181.000.

Kusuma Santi Wahyuningsih menegaskan bahwa larangan impor karpet ke wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 53 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 17 Tahun 2006. Karpet termasuk dalam komoditi Tekstil dan Produk Tekstil yang persyaratan impornya harus dilengkapi dokumen dari instansi terkait berupa Laporan Surveyor (LS).

Pemusnahan ribuan barang ilegal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dan mengatasi peredaran barang ilegal di perbatasan. Semoga tindakan ini dapat menjadi contoh bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga keamanan, perekonomian, dan kesehatan negara.



BERITA TERBARU



Gelombang PHK Pabrik Tekstil Terus Berlanjut, 6.500 Orang Kini Terdampak

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia masih dihadapkan pada

gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlanjut. Data terbaru mengungkapkan bahwa ada penambahan satu perusahaan lagi yang melakukan PHK pada tahun ini. Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), mengungkapkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK akibat gelombang ini mencapai 1.500-an orang, dan ini menjadi tambahan dari sebelumnya. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Ristadi kepada CNBC Indonesia pada Kamis, 2 November 2023, hingga Oktober 2023, sudah ada 7 perusahaan yang melakukan PHK dengan total pekerja yang terkena dampak mencapai 6.500-an orang. Lokasi perusahaan yang melakukan PHK terbaru ini terletak di Serang, Banten, dengan rencana relokasi yang masih belum jelas.

Sayangnya, Ristadi enggan untuk memberikan informasi mengenai nama-nama perusahaan yang terlibat dalam gelombang PHK ini. Dia menjelaskan bahwa situasinya sangat sulit, tetapi dia memaklumi bahwa PHK ini dipicu oleh masalah trust perbankan dan pembeli (buyer) yang tidak stabil.

Selain Serang, Banten, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam gelombang PHK ini juga terletak di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tangerang, Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar, dan Jawa Barat.

Ristadi menjelaskan bahwa gelombang PHK di sektor pabrik tekstil dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut untuk bertahan di tengah serbuan produk impor, serta anjloknya kinerja ekspor.

Perlambatan Industri Manufaktur

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis data mengenai Indeks

Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Oktober 2023. Data tersebut menunjukkan penurunan sebesar 1,81 poin, sehingga IKI turun menjadi 50,70 dibandingkan dengan indeks bulan September 2023 yang mencapai 52,51.

Data IKI 2023 menunjukkan tren penurunan setelah mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir pada bulan Juni 2023, ketika IKI mencapai 53,93. Pada bulan Mei 2023, IKI berada di posisi 50,90.

Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menjelaskan bahwa perlambatan IKI bulan Oktober 2023 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penurunan daya beli global, terutama di negara mitra dagang utama Indonesia seperti AS, China, dan Eropa, mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak pada kenaikan biaya produksi karena harga impor menjadi lebih tinggi. Faktor ketiga adalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal, dan kenaikan harga energi yang terjadi pada bulan Oktober.

Febri menambahkan bahwa upaya penegakan hukum dan kerjasama antara kementerian/lembaga terkait masih belum sepenuhnya berhasil dalam meredam masuknya barang impor ilegal yang merusak pasar domestik.

Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh industri tekstil dan manufaktur di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan melindungi pekerja industri TPT di masa depan.



CiFFest 2023: Komitmen IKJ Dorong Fesyen Berkelanjutan



Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menjadi Pelopor Gerakan Fesyen Ramah Lingkungan Pada Minggu (12/11), Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta menjadi saksi gelaran Ciki Fashion Festival (CiFFest) 2023, yang diinisiasi oleh Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Acara ini tidak sekedar menyajikan tren dan karya terkini dalam dunia fesyen, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku ekosistem fesyen Indonesia untuk bersatu dalam misi bersama: mendorong fesyen berkelanjutan.

Edukasi dan Kesadaran Lingkungan dalam Fokus

Tema yang diusung oleh CiFFest tahun ini adalah Fashion Environmental, yang menandakan komitmen IKJ dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu lingkungan yang terkait dengan industri fesyen. Anindyo Widito, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) IKJ, menyatakan bahwa tujuan utama dari tema ini adalah untuk merangsang tindakan

berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui gerakan ini, CiFFest berupaya melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem fesyen, mulai dari industri, desainer, produsen, reseller, konsumen, hingga organisasi lingkungan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif dan memberikan solusi konkret terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi oleh industri fesyen.

Peran Mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam Aksi Nyata

Dalam upaya untuk mewujudkan aksi nyata dalam mendukung fesyen berkelanjutan, Anindyo Widito mengajak mahasiswa dan komunitas perguruan tinggi lainnya untuk turut serta. "Kita mulai menggalakkan untuk mahasiswa dan teman-teman dari perguruan tinggi lain plus asosiasi, untuk kita coba membuat karya-karya yang ramah lingkungan," ujar Dito kepada awak media.

Peran mahasiswa dalam menciptakan karya yang ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan di industri fesyen. Dengan melibatkan generasi muda, CiFFest tidak hanya menjadi ajang pameran kreativitas, tetapi juga panggung untuk mengembangkan ide dan inovasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pemahaman Terhadap Dampak Negatif Industri Fesyen

Rangkaian kegiatan CiFFest tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang isu-isu lingkungan yang dihadapi oleh industri fesyen, tetapi juga untuk menyoroti dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Polusi air dan udara, penggunaan bahan kimia berbahaya, limbah tekstil, serta dampak perubahan iklim akibat

produksi dan transportasi menjadi fokus perbincangan.

Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan seluruh elemen dalam industri fesyen, termasuk konsumen, akan semakin tergerak untuk berperan serta dalam menciptakan perubahan positif.

Mendorong Pilihan Berkelanjutan Melalui Kampanye Kesadaran

Gerakan fesyen ramah lingkungan yang diusung oleh CiFFest tidak hanya berhenti pada tingkat industri. Melalui kampanye-kampanye kesadaran, CiFFest berupaya memotivasi masyarakat, khususnya konsumen, agar dapat membuat pilihan yang lebih berkelanjutan dalam memilih produk pakaian.

Dalam konteks ini, transparansi dalam rantai pasok fashion menjadi kunci. Memungkinkan konsumen untuk mengetahui asal-usul dan cara produksi produk, serta penggunaan label yang mengidentifikasi produk berkelanjutan, akan memberikan kontribusi besar dalam mendorong pilihan konsumen yang lebih berkesadaran lingkungan.



Tantangan Berat Menanti Industri Tekstil Indonesia di Tahun 2024

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi tantangan serius dengan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, mengungkapkan bahwa kondisi kontraksi terus berlanjut, memaksa industri ini untuk memilih ketahanan daripada menaikkan upah bagi karyawan. Redma menyatakan bahwa kinerja industri TPT masih terkontraksi hingga akhir kuartal keempat tahun 2023, dan belum terlihat adanya perbaikan signifikan untuk tahun 2024.



Kondisi ini memaksa pengusaha dan karyawan untuk memahami bersama bahwa kenaikan upah saat ini tidaklah memungkinkan. Meskipun pemerintah telah memberikan kebijakan melalui pembatasan impor untuk melindungi industri, Redma menilai bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam menangani masalah impor di pelabuhan yang merupakan sumber permasalahan.

Upaya melindungi industri tekstil dalam konteks pembatasan impor dianggap belum mencapai sumber masalah yang sesungguhnya, yaitu di pelabuhan di mana Bea Cukai berperan. Redma menyatakan bahwa stabilitas ekonomi seharusnya tetap diutamakan, terlebih dalam tahun politik, dan pemerintah perlu menghindari penyelesaian masalah ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan politik jangka pendek.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga telah mengungkapkan proyeksi yang sama, dengan Ketua Umum Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyatakan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang berat bagi industri TPT Indonesia dan negara lainnya. Faktor-faktor seperti melemahnya permintaan ekspor dan banjirnya impor TPT di pasar domestik menjadi hambatan utama. Jemmy juga memproyeksikan pemulihan ekonomi global baru akan terlihat pada awal tahun 2025.

Sementara beberapa negara menerapkan trade barrier atau pembatasan arus perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri, Indonesia harus lebih tanggap terhadap tantangan ini. Kelemahan dalam menerapkan Trade Barrier membuat produk TPT impor lebih mudah masuk, sehingga perlu ada strategi yang lebih efektif untuk melindungi industri TPT dalam negeri.

Dalam menghadapi tahun-tahun berat yang akan datang, industri TPT Indonesia perlu bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam inovasi, peningkatan kualitas produk, dan penetrasi pasar global bisa menjadi langkah-langkah kunci untuk meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.



Dampak Thrifting Terhadap Industri Tekstil di Indonesia: Ancaman dan Tantangan



Pertumbuhan perdagangan pakaian, baik domestik maupun internasional, semakin berkembang pesat. Kehadiran merek-merek fashion internasional di Indonesia mempengaruhi keinginan masyarakat untuk memiliki produk dari brand tersebut, seringkali karena faktor status sosial dan gaya hidup. Fenomena ini memicu perilaku konsumtif yang lebih mengutamakan penampilan daripada kebutuhan riil, yang berdampak pada ekonomi, terutama bagi mereka dengan pendapatan terbatas. Munculnya minat masyarakat pada pakaian bekas impor atau yang dikenal sebagai Thrifting telah menciptakan pasar baru di Indonesia. Toko-toko Thrift Shop menjual pakaian bekas impor dengan brand-brand terkenal dan harga yang lebih terjangkau, menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi sebagian orang. Namun, dampaknya tidak hanya sebatas ekonomi, tetapi juga terhadap lingkungan.

Salah satu aspek positif dari Thrifting adalah pengurangan limbah tekstil, yang merupakan masalah serius dalam lingkungan global. Namun, pakaian bekas impor sering kali mengandung limbah berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagian besar pakaian ini berakhir di tempat pembuangan akhir karena kualitasnya yang tidak terjamin, bahkan dapat

membahayakan kesehatan penggunaanya karena kemungkinan adanya bahan kimia berbahaya.

Pentingnya kehati-hatian saat membeli pakaian bekas impor ditekankan, termasuk memeriksa kebersihan dan kualitas pakaian tersebut. Namun, kehadiran Thrifting juga mengancam industri tekstil lokal. Harga yang lebih murah dari pakaian bekas impor mengurangi minat masyarakat terhadap produk lokal, mempengaruhi lapangan kerja, pendapatan industri tekstil, dan meningkatkan jumlah impor pakaian di Indonesia.

Pemerintah telah mencoba untuk mengatasi dampak negatif ini dengan melarang impor pakaian bekas melalui regulasi tertentu. Namun, larangan ini belum efektif karena masih banyaknya pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di pasar. Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap kegiatan impor pakaian bekas menjadi langkah yang penting untuk dilakukan guna melindungi industri tekstil lokal.

Dalam menghadapi tantangan dari Thrifting, keseimbangan antara upaya menjaga lingkungan dan mendukung industri lokal perlu ditemukan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif sambil menjaga berlangsungnya industri tekstil yang berkelanjutan di Indonesia.

Bahan Baku Tekstil Impor dan Tantangan Industri TPT Indonesia

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat masih tingginya pasokan bahan baku impor di pasar dalam negeri. Situasi ini menyebabkan penjualan industri serat dan

benang filamen menjadi lesu, memicu kekhawatiran akan kelangsungan industri tersebut. Farhan Aqil, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), menyoroti bahwa penurunan impor bahan baku menjadi harapan utama bagi industri TPT. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa penurunan ini hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu. "Tekstil impor masih membanjiri pasar, membuat sulitnya anggota kami dalam menjual produknya," ujar Farhan kepada .

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan impor bahan baku penolong sebesar 6,08% (year-on-year/yoy) dengan nilai impor mencapai US\$13,44 miliar pada Oktober 2023. Meskipun terjadi penurunan, secara kumulatif hingga Oktober 2023, total nilai impor bahan baku penolong mencapai US\$19,32 miliar atau turun 12,65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penggunaan bahan baku impor yang mencapai 60-70% dari konsumsi tekstil nasional menjadi perhatian serius. Farhan meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Saat ini, pemerintah tengah melakukan sosialisasi terkait kebijakan tata niaga impor melalui revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022, termasuk pembahasan tentang substitusi impor untuk kawasan berikat.

Namun, Farhan memperkirakan bahwa industri TPT masih akan mengalami tekanan hingga tahun 2024 jika tidak ada perhatian serius dari pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, menjelaskan bahwa pelemahan impor bahan baku juga disebabkan oleh melemahnya utilitas industri. Utilitas industri hulu ke hilir tekstil dan produk tekstil tercatat hanya sebesar 50%.

Menanggapi situasi ini, Jemmy menyatakan optimisme terkait dorongan dari Kementerian Perindustrian untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal guna meningkatkan utilisasi industri. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan pasar lokal yang ada sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Meskipun terdapat sinyal lemahnya produksi dalam negeri, langkah-langkah strategis yang dicanangkan diharapkan dapat menguatkan industri TPT dalam menghadapi tekanan impor bahan baku yang masih dominan di pasar domestik. Namun, perhatian dan langkah konkret dari pemerintah tetap menjadi kunci dalam menjaga daya saing serta keberlanjutan industri tekstil Indonesia.



Gelombang PHK di Industri Tekstil: Tantangan dan Tuntutan untuk Masa Depan

Industri manufaktur, khususnya sektor tekstil, masih terjebak dalam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlanjut. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat angka yang mengkhawatirkan: sejak awal tahun 2023, lebih dari 7.200 pekerja di sektor tekstil menjadi korban PHK. Kabar terbaru tentang penutupan pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat pada 2 November 2023 lalu menyisakan pertanyaan besar terkait nasib sekitar 700 karyawan yang belum jelas akan mendapatkan pesangon. Manajemen

pabrik tampaknya lebih memilih menempuh jalur hukum dalam penyelesaiannya.

Presiden KSPN, Ristadi, menyampaikan bahwa angka PHK di industri TPT telah mencapai 57.000 orang, melibatkan 36 perusahaan di berbagai wilayah, mulai dari Semarang, Pekalongan, Sukoharjo, Magelang, Demak, Karanganyar, provinsi Jawa Barat, hingga Banten. Namun, kondisi ini bukan hanya terjadi sejak awal tahun 2023; sejak tahun 2022, sudah tercatat lebih dari 56.976 pekerja yang terkena PHK.

Penyebab utama gelombang PHK ini, menurut Ristadi, adalah serbuan produk impor yang merajalela di pasar domestik. Sementara itu, pabrik yang mengandalkan pasar ekspor juga terdampak oleh menurunnya permintaan di tengah kondisi ekonomi global yang tertekan.

Meskipun pemerintah berjanji untuk mengontrol arus barang impor dengan mengubah kebijakan pengawasan, hingga kini dampaknya belum terlihat secara signifikan. Ristadi menegaskan bahwa selain otomatisasi pabrik, serbuan produk impor menjadi pemicu utama penutupan pabrik dan PHK massal.

Dalam menanggapi kondisi ini, Ristadi menekankan dua upaya penyelamatan yang mendesak dari pemerintah: pertama, untuk industri berorientasi pasar lokal, dengan langkah-langkah seperti menghentikan impor ilegal, operasi pasar barang ilegal, bantuan modernisasi mesin tekstil, serta kebijakan perbankan dan pajak yang bersahabat. Kedua, untuk industri berorientasi ekspor, dengan kebijakan terkait pajak, harga energi, perizinan yang efisien, serta dukungan promosi pasar tekstil di luar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Penutupan pabrik terus terjadi, menambah daftar panjang pekerja yang kehilangan

pekerjaan. Pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dalam memberikan solusi konkrit guna menjaga industri padat karya seperti sektor TPT tetap berjalan serta memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena dampak PHK.

Terpuruknya Industri Tekstil DIY: Tantangan dan Saran Ekonom

Industri tekstil D.I.Yogyakarta (DIY) kini tengah merana dalam kondisi sulit, dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan situasi pasar domestik yang tidak menguntungkan. Ekonom dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y. Sri Susilo, menawarkan sejumlah saran kepada pemerintah untuk menjaga ketahanan sektor ini. Salah satu saran utamanya adalah perlunya perlindungan terhadap pasar domestik melalui pembatasan impor. Sri Susilo menekankan bahwa pembatasan ini penting agar impor tidak bebas, dengan opsi lain seperti kenaikan tarif yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Dia juga mengusulkan pemberian insentif seperti pengurangan pajak guna mendukung industri tekstil.

Kendati pasar domestik menurun, Sri Susilo mengidentifikasi dua penyebab utama. Pertama, penurunan permintaan karena preferensi masyarakat yang beralih ke keperluan lain. Kedua, produk domestik kalah bersaing dengan produk impor yang belum terbatas, serta kehadiran pakaian bekas yang semakin meluas di pasaran.

Trend membeli pakaian bekas menjadi daya tarik bagi banyak konsumen karena harganya yang jauh lebih terjangkau, memungkinkan mereka untuk mendapatkan produk bermerek dengan harga yang lebih rendah. Namun, hal ini menjadi beban bagi produsen

tekstil yang terpaksa menghadapi penurunan permintaan.



Upaya untuk bertahan telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pengurangan produksi, jam kerja yang lebih singkat, bahkan pemangkasan jumlah karyawan. Namun, kondisi ini masih menunjukkan penurunan yang signifikan dalam arus kas perusahaan.

Pemerintah juga diminta untuk membantu industri tekstil dalam mencari pasar ekspor yang non-tradisional. Upaya ekspansi ke pasar-pasar seperti Afrika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Latin dapat menjadi peluang baru bagi industri ini.

Dalam menghadapi tantangan impor ilegal dan situasi pasar lokal yang memprihatinkan, pengusaha tekstil juga mengharapkan dukungan dan pelonggaran dari pemerintah. Mereka menekankan perlunya penekanan terhadap biaya-biaya yang membebani, serta penanganan yang lebih tegas terhadap impor ilegal yang mengganggu pasar lokal.

Situasi yang dihadapi industri tekstil D.I.Yogyakarta memerlukan solusi yang komprehensif, baik dari pemerintah, perbankan, maupun dalam pengaturan hubungan antara pengusaha dan karyawan. Dukungan dan kehati-hatian dalam kebijakan serta solusi yang bijak diharapkan dapat membawa industri ini keluar dari krisis yang sedang dialaminya.



WORLD TEXTILES JOURNAL



DAKIN CHEMICAL SOUTHWEST ASIA CO., LTD.
No. 432, Binj. East 4th Floor Unit 3025, 1411, Subramah Road,
Bangkok/Sub-District 11, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand
Tel: +66-2-399-2922

Search here for more information

UNIDYNE



Pasar Tekstil di Jakarta yang Kian Meredup

Pasar tekstil di Jakarta, yang sebelumnya dikenal akan keramaian dan kegiatan tawar-menawar yang bersemangat, belakangan mengalami penurunan aktivitas yang signifikan. Tampaknya, suasana sibuk dengan pembeli dan pedagang yang menjadi pemandangan biasa di beberapa pasar terkemuka di Ibu Kota kini telah redup. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, di mana sebenarnya pelanggan setia pasar tekstil beralih? Di tengah kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada suatu siang, aktivitas dagang berbeda dari keramaian luar pasar. Blok A dan Blok B Pasar Tanah Abang pada lantai dasar tampak ramai dengan calon pembeli yang berkeliling. Namun, lonjakan pengunjung ini tidak berdampak signifikan pada penjualan pedagang tekstil di dalam.

Anto (30), seorang karyawan di salah satu kios pakaian di lantai dasar Blok B Pasar Tanah Abang, mengungkapkan bahwa sejak larangan operasi Tiktok Shop pada 4 Oktober 2023, kondisi pasar tekstil belum membaik. Setiap hari, toko-toko mereka beroperasi tanpa adanya pembeli yang datang.

Menurut Anto, penurunan omzet bukan hanya terjadi karena penutupan Tiktok Shop, melainkan juga dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat. Sebelumnya, Tiktok Shop menjadi sarana penjualan yang efektif bagi mereka, dengan penjualan melalui fitur Tiktok Live yang mampu menjual hingga 100 potong pakaian setiap harinya. Namun, penjualan secara langsung di toko hanya mencapai enam potong dalam seminggu.

Upaya untuk memanfaatkan pasar daring melalui Tiktok juga dilakukan oleh Roby (24), karyawan di kios pakaian di lantai 1 Blok B. Namun, pengalaman berjualan di Tiktok tidak memberikan hasil yang memuaskan. Meskipun berusaha secara aktif selama tiga bulan, hanya satu potong barang yang berhasil terjual.

Menurut Roby, tantangan dalam penetrasi pasar daring terutama terletak pada konsistensi siaran, biaya promosi, dan ketidakpastian peningkatan jumlah penonton. Kondisi ini membuatnya kesulitan dalam membagi waktu dan mengalami kesulitan mencapai omzet seperti sebelumnya.

Afmi (40), seorang pedagang di lantai 3 Blok A Pasar Tanah Abang, mengalami penurunan omzet yang drastis. Bahkan, sebagian pedagang lainnya telah menutup atau menyewakan kios mereka karena pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional. Saat ini, hanya sedikit pedagang yang masih bertahan.

Pasar tekstil di Jakarta, yang sebelumnya dikenal akan kehadiran pembeli dari berbagai daerah, kini mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas perdagangan. Tampaknya, penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk penutupan platform daring seperti Tiktok Shop dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini

menciptakan tantangan baru bagi pedagang dalam menjaga kelangsungan usaha mereka.

Pengusaha Tekstil Menghadapi Tantangan UMP 2024: Pasrah atau Terus Berjuang?

Para pengusaha di industri tekstil menghadapi tantangan yang semakin berat terkait dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2024. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengakui bahwa kondisi industri tekstil belum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selama setahun terakhir, industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan negatif berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukkan bahwa pada kuartal 2 tahun 2022, industri tekstil mengalami pertumbuhan sebesar 13,74%, sementara pada kuartal 3 tumbuh 8,09%, dan pada kuartal 4 hanya tumbuh 3,61%. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi menunjukkan angka negatif, dengan -1,7% pada kuartal 1 dan -2,7% pada kuartal 2.

Redma menyatakan bahwa kenaikan UMP tahun 2024 yang telah diumumkan oleh pemerintah akan menjadi beban baru bagi pelaku industri, terutama dalam industri tekstil dan pakaian jadi. Dia menekankan bahwa pengusaha akan berjuang mengikuti kenaikan tersebut jika mampu, tetapi juga merasa pasrah jika tidak mampu mengikuti peningkatan tersebut.

Menurut Redma, meskipun kenaikan UMP bertujuan untuk meningkatkan daya beli buruh, kondisi industri, terutama dalam sektor tekstil dan pakaian jadi, belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Tingginya impor pakaian yang sulit dikendalikan oleh pemerintah menjadi salah

satu tantangan utama, mengakibatkan kesulitan mendapatkan pasar dalam negeri dan melemahnya permintaan ekspor.

Para pelaku industri juga menyadari bahwa pelemahan sektor tekstil dan pakaian jadi telah dipahami oleh para pekerja. Redma menyebutkan bahwa beberapa pekerja lebih memilih untuk tetap bekerja daripada mendapatkan kenaikan upah namun industri tempat mereka bekerja tidak bisa bertahan lama.

Dalam pandangan Redma, para pekerja di sektor tekstil lebih memahami pentingnya memiliki pekerjaan yang tetap daripada mendapatkan kenaikan upah. Bagi mereka, tidak ada jaminan bahwa jika upah dinaikkan, industri tempat mereka bekerja akan bertahan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian di antara pekerja terkait masa depan pekerjaan mereka.

Tantangan ini memperlihatkan betapa kompleksnya situasi industri tekstil dan pakaian jadi dihadapi oleh para pengusaha. Meskipun pengusaha ingin mempertahankan industri mereka, kenyataan kondisi pasar yang sulit dikendalikan oleh regulasi menjadi kendala utama yang harus diatasi untuk memastikan kelangsungan industri tekstil di masa mendatang



**WORLD
TEXTILES
JOURNAL**

Kembalinya Toko TikTok dan Kemunduran Industri Tekstil: Dampaknya terhadap Barang Lokal dan Ketegangan Ekonomi

Kondisi perekonomian pada hari Jumat, 24 November 2023 dipenuhi dengan spekulasi potensi kembalinya TikTok Shop—platform media sosial yang berubah menjadi pusat e-commerce yang ditutup pada 4 Oktober. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM Enterprises, mengumumkan potensi kolaborasi TikTok dengan tiga perusahaan: Bukalapak, Tokopedia, dan CT Corp. Jika TikTok Shop kembali beroperasi, apa dampaknya terhadap kehadiran produk lokal? Masuknya barang impor, yang merupakan kekhawatiran umum di platform ini, sering kali menutupi visibilitas produk dalam negeri.



Perjuangan Industri Tekstil di Tengah Tekanan Perekonomian

Agenda hari ini juga menyoroti tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh industri tekstil. Bisakah industri ini bangkit di tengah menurunnya ekspor, tergerusnya pasar domestik akibat impor, dan meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan upah?

Sektor ini masih menyerap banyak lapangan kerja, dan aspirasi Indonesia untuk melakukan industrialisasi sangat penting

dalam mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Apakah Indonesia harus mengambil contoh dari strategi Tiongkok, atau adakah kebutuhan untuk membentuk kementerian khusus di bidang tekstil, serupa dengan pendekatan yang dilakukan Bangladesh? ?

Peristiwa Ekonomi dan Proyeksi Masa Depan Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan mengadakan konferensi pers "APBN Kita". Acara lainnya adalah Jakarta Wedding Festival di Jakarta Convention Center yang berlangsung mulai hari ini hingga Minggu, 26 November 2023. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengadakan media Gathering, serta Indonesia Fintech Summit & Expo ke-5 yang menjadi puncak acara. Bulan Fintech Nasional, ditutup di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Pada akhir pekan mendatang, Kompas akan menampilkan analisis fenomena kelas menengah yang "eating to saving" untuk menopang kehidupan sehari-hari dan proyeksi harga komoditas ekspor andalan Indonesia pada tahun 2024.

Seluk-beluk pekerja paruh waktu atau pekerja lepas, yang merupakan pilihan populer di kalangan kaum muda, juga akan dieksplorasi. Gaya kerja alternatif ini menawarkan perubahan dari struktur pekerjaan tradisional jam 9 pagi sampai jam 5 sore.

Lebih lanjut, artikel ini akan menggali berbagai pilihan perjalanan dan tantangannya selama liburan panjang, dampak ketidakpastian ekonomi global dan inflasi terhadap melemahnya transaksi investasi di hotel-hotel di Asia Pasifik, dan perspektif para bankir terhadap dampak suku bunga acuan Bank Indonesia yang ditetapkan sebesar 6% dengan proyeksi untuk tahun 2024.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT): Menyongsong Masa Depan dengan Tenaga Kerja Kompeten



Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan kontribusi hampir 20% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur, industri ini menjadi salah satu sektor yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami betul bahwa keberhasilan industri ini sangat bergantung pada keterampilan dan produktivitas tenaga kerjanya. Pentingnya SDM industri yang kompeten memunculkan langkah strategis dari Kemenperin. Melalui program pendidikan vokasi yang dijalankan dengan berbagai lembaga, termasuk Politeknik STTT Bandung, Kemenperin memastikan terciptanya SDM yang

sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini menjadi jelas pada Wisuda Politeknik STTT Bandung tahun 2023, di mana 309 lulusan dari berbagai program studi telah siap untuk memasuki dunia industri.

Pendekatan yang diambil oleh Kemenperin tidak hanya sebatas pada pendidikan formal, namun juga menggarisbawahi pentingnya hubungan erat antara dunia pendidikan vokasi dan industri itu sendiri. Terbukti, kemitraan yang dibangun oleh Politeknik STTT Bandung dengan berbagai industri

melalui penyerapan lulusan telah memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor TPT.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI), Emmy Suryandari, menyoroti bahwa meskipun kontribusi Politeknik STTT Bandung sangat berarti, jumlah lulusannya masih belum mencukupi kebutuhan industri. Kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dalam industri tekstil dan garmen mencapai 500 orang, sementara jumlah lulusan masih terbatas.

Tina Martina, Direktur Politeknik STTT Bandung, menegaskan komitmen institusi untuk terus meningkatkan kapasitas siswa guna menjawab kebutuhan industri. Keberhasilan mereka dalam mencetak lulusan yang tidak hanya tepat waktu tetapi juga berkualitas, tercermin dalam angka rata-rata 91,78% lulusan tepat waktu dan 100% di antaranya mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 7 bulan.

Prestasi lulusan Politeknik STTT Bandung pun patut diacungi jempol. Dengan semangat tinggi, 137 lulusan pada tahun ini meraih predikat dengan pujian, menunjukkan kompetensi yang diakui dalam dunia industri tekstil.

Ke depan, kolaborasi antara institusi pendidikan vokasi dan industri perlu diperkuat. Penghargaan yang diberikan kepada mitra industri pada Wisuda Politeknik STTT Bandung Tahun 2023 adalah bukti nyata apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin. Ini menjadi langkah awal yang menggairahkan dalam menyongsong masa depan industri tekstil dan produk tekstil yang lebih tangguh.

Peningkatan kapasitas, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi menjadi kunci

bagi industri TPT untuk tetap bersaing secara global. Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan lulusan-lulusan berkompeten akan terus mengisi peran penting dalam memajukan sektor ini ke arah yang lebih baik.

Dampak Libur Panjang Terhadap Industri: Tantangan dan Peluang

Libur panjang yang sering menjadi momen dinantikan oleh banyak orang juga membawa tantangan tersendiri bagi sektor industri, terutama bagi industri tekstil dan pariwisata. Dialog antara Bramudya Prabowo dengan Redma Gita Wirawasta dari Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) serta Maulana Yusran dari Apindo Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif telah menggambarkan berbagai dampak yang terjadi pada akhir tahun 2023 serta kesiapan pengusaha menghadapi aturan libur dan cuti bersama di tahun 2024.

Menurut Redma Gita Wirawasta, libur panjang akhir tahun 2023 menjadi tantangan tersendiri bagi industri tekstil. Sistem logistik terhambat dan biaya lembur bagi pekerja menjadi beban tambahan bagi bisnis tekstil. Penghentian sementara operasional dalam periode libur ini dapat mengganggu alur produksi serta menambah biaya operasional yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri tekstil.

Tidak hanya itu, Redma Gita juga menyoroti perlunya penyesuaian aturan libur cuti bersama dengan sektoral, mengingat dampaknya yang tidak seragam di setiap sektor industri. Kebijakan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri dapat membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Di sisi lain, Maulana Yusran dari Apindo Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif menekankan bahwa libur panjang juga memiliki dampak positif bagi bisnis pariwisata. Meskipun pemulihannya tidak merata dan mayoritas dirasakan oleh daerah tujuan wisata serta dukungan dari pemerintah, libur panjang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pertumbuhan sektor pariwisata.

Dalam melihat kesiapan menghadapi aturan libur dan cuti bersama tahun 2024, pengusaha perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik dampak logistik dan biaya operasional pada industri tekstil maupun potensi pertumbuhan pada sektor pariwisata. Upaya penyesuaian strategi operasional, pengelolaan sumber daya, dan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari kebijakan libur panjang.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap implikasi dari kebijakan libur panjang serta langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan industri, terutama sektor tekstil dan pariwisata, dapat tetap berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian tanah air.

Kemenperin Melalui Politeknik STTT Bandung: Membentuk Kekuatan Tenaga Kerja di Industri Tekstil

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memberikan dorongan besar terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri, khususnya dalam sektor tekstil. Langkah ini diwujudkan melalui Politeknik STTT Bandung, yang telah melahirkan 309 lulusan di berbagai bidang tekstil dan produk tekstil. Tujuan utamanya adalah untuk

memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan kompeten yang mendukung pertumbuhan industri yang tangguh dan mampu bersaing di pasar global. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokan, program prioritas Kemenperin dalam membangun SDM industri terampil salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan vokasi. Politeknik STTT Bandung menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam melahirkan lulusan-lulusan terampil dalam bidang tekstil.

"Kami berfokus pada pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kolaborasi erat antara dunia pendidikan vokasi dengan industri menjadi kunci penting dalam proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pembelajaran, hingga penempatan kerja lulusan," ujar Masrokan.

Politeknik STTT Bandung pada tahun 2023 ini telah berhasil melahirkan 309 lulusan dengan beragam program studi, seperti Magister Terapan RTA, Teknik Tekstil, Kimia Tekstil, Produksi Garmen, serta program kerja sama industri. Namun, terdapat kesenjangan antara jumlah lulusan yang dihasilkan oleh Politeknik STTT Bandung dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri tekstil yang mencapai 500 orang.

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI), Emmy Suryandari, kesenjangan ini terjadi karena kapasitas mahasiswa di Politeknik STTT Bandung yang terbatas. Meskipun demikian, ia optimistis bahwa para lulusan Politeknik STTT Bandung memiliki kemampuan untuk mengisi posisi penting di industri tekstil, seperti menjadi supervisor.

"Kami berharap Politeknik STTT Bandung dapat meningkatkan kapasitas siswa untuk memenuhi kebutuhan industri di masa mendatang," ungkap Emmy.

Politeknik STTT Bandung telah menjalin kerja sama yang erat dengan industri, yang tercermin dari kesuksesan penyerapan lulusan mereka di dunia kerja. Pada acara wisuda tahun 2023, Politeknik STTT Bandung juga memberikan penghargaan kepada mitra industri sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin.

Dengan rata-rata tingkat kelulusan yang tinggi dan implementasi sistem pendidikan dual system, Politeknik STTT Bandung terus berupaya mencetak lulusan-lulusan yang siap terjun langsung ke dunia industri, mendukung visi Kemenperin dalam memajukan sektor tekstil dan produk tekstil di Indonesia.

Kesinambungan dari kolaborasi antara dunia pendidikan vokasi dan industri akan menjadi pilar utama dalam memastikan terciptanya SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan serta dinamika industri tekstil yang terus berkembang.

Indonesia Siap Terapkan Aturan Harga Pokok Produksi (HPP) di E-commerce: Langkah Menuju Keseimbangan Pasar Digital



Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Indonesia, Teten Masduki, telah mengungkapkan rencana untuk

menerapkan aturan harga pokok produksi (HPP) dalam ranah e-commerce di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Teten menyatakan bahwa prinsip-prinsip terkait aturan HPP di e-commerce telah disetujui dalam rapat Menko. Ini menggambarkan upaya serius pemerintah dalam mengatur pasar digital dengan lebih cermat.

Pengambilan kebijakan ini juga mengambil inspirasi dari langkah yang sudah diterapkan oleh China terkait pengaturan pasar digital mereka. Di China, kebijakan pelarangan penjualan barang di e-commerce dengan harga di bawah HPP telah diterapkan untuk mencegah praktik dumping dan predatory pricing.

Namun demikian, Teten menegaskan bahwa pembahasan mengenai aturan HPP akan ditindaklanjuti setelah masa evaluasi Permendag Nomor 31 tahun 2023 selesai. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan ekonomi.

Salah satu aspek yang masih dalam pembahasan adalah apakah aturan HPP ini akan berlaku untuk semua barang di e-commerce atau hanya pada sebagian produk tertentu. Untuk membahas hal ini, KemenkopUKM berencana melakukan pertemuan dengan para asosiasi pelaku usaha, seperti asosiasi pengusaha tekstil, garmen, dan elektronik.

Menurut Teten, kehadiran e-commerce global seperti TikTok Shop diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan platform e-commerce dalam negeri, asalkan tidak melakukan praktik predatory pricing yang

merugikan pasar. Dia juga menekankan bahwa pemerintah ingin menjaga agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tergerus oleh dominasi e-commerce global.

Teten juga mengingatkan e-commerce global untuk menghormati perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Menurutnya, pengembangan ekonomi nasional harus dihormati, dan e-commerce global harus mengadopsi bisnis model yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur e-commerce menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan seimbang bagi semua pemangku kepentingan, dari konsumen hingga pelaku usaha.

Terlebih, langkah-langkah tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing di pasar digital global dengan memperkuat regulasi yang tepat guna dan menghormati dinamika pasar lokal.

INDOTEXTILES
The Indonesia Textiles & Apparel Community Reference

HOME ARTICLE LATEST NEWS MARKET PLACE DOWNLOAD LIBRARY

Search

Taiwan Textiles Road Show - INDONESIA
Contact us at: info@indotextiles.com
Phone: +62 21 6251 1234
Fax: +62 21 6251 1234
Address: Jl. Raya Indonesia No. 1234, Jakarta 10111, Indonesia

Worker Application Against COVID-19
Install Now

The rise of cheap imported products threatens the existence of the local textile industry
Details
Written by Admin1
Published: 10 June 2021
Read more

The existence of the local textile and textile products (TPT) industry is increasingly threatened by the proliferation of cheap imported goods flooding the domestic market. This is evidenced by the drop in the average utilization of the textile industry to around 55% from the previous 70% at the end of 2020.

Nigeria is interested in footwear and herbs from Indonesia

EXPERT PERSPECTIVE
Awakening the Economy of Eid
Enny Sri Hartati
Senior Researcher
Institute for Development of Economic and Finance
INDEF